

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang dilaksanakan melalui *penguatan otonomi daerah* dan *pengelolaan sumber daya* yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut maka diperlukan suatu pengintegrasian dan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana pembangunan dijadikan sebagai acuan kegiatan sesuai dengan kurun waktu perencanaan dan dapat juga dijadikan tolok ukur, evaluasi, capaian kegiatan dari organisasi. Apabila implementasi kegiatan mengalami suatu kendala, maka yang perlu dievaluasi selain sistem penyelenggaraan juga yang tidak kalah penting adalah sejauh mana sebuah perencanaan dapat mencapai kebutuhan riil dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu wilayah kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan kinerja (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dan salah satu unsur komponen sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang harus dilakukan setiap instansi. Dengan membangun sistem perencanaan yang menyeluruh yang meliputi perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis.

Proses penyusunan Renja SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. pelaksanaan forum SKPD; dan
- d. penetapan Renja SKPD.

Dalam penyusunan Renja SKPD tidak terlepas dari perencanaan strategis, rancangan awal RKPD serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Sementara Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi serta menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Sebagai unit kerja yang kompleks karena merupakan locus dan focus dari kegiatan SKPD, barometer capaian kegiatan (goal) bisa terukur dengan jelas sejauh mana keterpaduan rencana yang telah tersusun.

Karena itu, keberhasilan pembangunan yang ada di kecamatan pada sisi lain sangat tergantung pada perencanaan menyeluruh yang diarahkan untuk memenuhi tujuan itu semua.

Selain perencanaan, yang tidak kalah penting adalah mengetahui karakteristik wilayah (komparatif dan kompetitif advantied) yang dimiliki oleh kecamatan. Karena itu, Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu kecamatan yang berada pada posisi strategis dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta berada di daerah perbatasan, mencitrakan diri pada posisi sebagai “Kota Perbatasan Pencitraan Kabupaten”. Maknanya adalah masyarakat dari wilayah lain akan melihat riil Kotawaringin Barat Pangkalan Bun ada pada Kecamatan Pangkalan Banteng.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional merupakan dokumen perencanaan nasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penjelasan UU. 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (3) dikatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber dana pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak lain terhadap arah rencana pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai locus/focus kegiatan SKPD.
2. Ada konsistensi dan kesinambungan rencana dalam setiap tahapan/kurun waktu.
3. Adanya prioritas kegiatan yang menjadi penekanan dan diharapkan menjadi perhatian dari SKPD tingkat kabupaten.
4. Mewujudkan ketepatan dan kesepakatan tindak lanjut sebagaimana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Banteng disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan;
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Riveuw terhadap Rancangan Awal RKA-SKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan;
- BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2013 terkait dengan target dan realisasi capaian dapat dilihat secara umum pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome
Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2013

No.	Program dan Kegiatan	Input			Output			Outcome		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Uraian	Real.	Sat.	Uraian	Real.	Sat.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500,000	500,000	100	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	1.345	Buah	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	269	%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.914.000	24.575.328	94.83	Sarana kominikasi dan penerangan	12	bulan	Tercapainya pemakaian sarana komunikasi dan penerangan yang maksimal	100	%
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000	1.897.300	67.76	Perpanjangan STNK kendaraan bermotor	5	unit	Perpanjangan STNK Kendaraan dinas/ operasional	55.56	%
d.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	78.584.800	71.636.100	91.65	Jasa administrasi keuangan	12	bulan	Kegiatan administrasi keuangan dapat terselenggara dengan baik	83.33	%
e.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.770.000	25.653.500	92.37	Jasa kebersihan kantor	12	bln	Kebersihan kantor yang terpelihara	100	%
f.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000	3.340.000	66.80	Jasa perbaikan peralatan kerja	8	unit	Peralatan kerja yang siap digunakan	66.67	%
g.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.637.000	17.637.000	100	Tersedianya alat tulis kantor	12	bln	Tersedianya alat tulis kantor	100	%
h.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.640.000	20.380.000	98.74	Barang cetakan dan penggandaan	12	bln	Tersedianya barang cetakan, penggandaan	100	%
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.758.000	1.758.000	100	Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	4	maca m	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	100	%
j.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.146.000	14.146.000	100	Peralatan dan perlengkapan kantor	4	maca m	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%
k.	Penyediaan Makan dan Minuman	16.470.000	15.200.000	92.28	Makanan dan minuman rapat	5	kali	Tersedianya makanan dan	100	%

								minuman rapat		
I.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	138.036.400	135.900.600	98.45	Koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	876	kali	Tercapainya koordinasi ke kepala desa dan instansi vertikal di kec. P. Banteng	244.01	%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
a.	Pembangunan Gedung Kantor	229.834.300	223.539.514	97.26	Pagar dan Jalan Lingkungan kantor	2	paket	Terbangunnya Pagar dan Jalan Lingkungan kantor	100	%
b.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	34.873.500	34.873.500	100	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	2	Unit	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100	%
c.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.500.000	5.500.000	100	Tersedianya peralatan untuk gedung kantor	1	Unit	Tersedianya AC	100	%
d.	Pengadaan Mebeleur	13.475.000	13.475.000	100	Tersedianya peralatan untuk gedung kantor	5	Unit	Tersedianya meja kerja	100	%
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	2.400.000	2.387.000	99.45	Pemeliharaan rumah jabatan	1	unit	Terlaksananya Pemeliharaan rumah jabatan	100	%
f.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4.400.000	4.389.000	99.75	Pemeliharaan gedung kantor aula, mushola dan pagar	3	unit	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan pagar	100	%
g.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.337.000	43.778.000	96.56	Pemeliharaan kendaraan dinas	9	unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100	%
h.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.940.000	2.418.000	82.24	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2	unit	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	14.190.000	14.190.000	100	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	29	stel	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36.400.000	29.532.000	81.13	Bimtek untuk pegawai	6	keg	Bimtek untuk pegawai	150	%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	236.000	236.000	100	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	kali	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	%
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	236.000	92.000	38.98	Laporan keuangan akhir tahun	1	kali	laporan keuangan akhir tahun	100	%
6	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa									
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	12.164.000	12.164.000	100	APB Desa	17	Desa	APB Desa yang lengkap	100	%

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 4 (empat) sasaran strategis adalah **Rp. 751.242.000,00** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 719.197.842,00** atau **95.73 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Dari data 6 (enam) program diatas terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana sepenuhnya yaitu, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 472.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 328.000,- (69.49%), hal ini disebabkan karena tidak terserapnya belanja penggandaan dan penjilidan penyusunan laporan keuangan akhir tahun sehingga penyerapan anggaran masih rendah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Pangkalan Banteng secara definitif diresmikan oleh Bupati Kotawaringin Barat pada Tanggal 23 Desember 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2003 Tanggal 14 Juni 2003.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng : 1.371 KM2 dengan jumlah desa pada awal pembentukan sebanyak 13 Desa. Pada tahun 2010 dimekarkan 4 (empat) desa baru yaitu Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Sungai Pulau dan Desa Sungai Pakit.

Distribusi jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 2.2
Distribusi Penduduk Desa
Di Kecamatan Pangkalan Banteng

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah
		KK	Laki-laki	Perempuan	
1.	Mulya Jadi	256	440	391	831
2.	Pangkalan Banteng	426	916	768	1.684
3.	Karang Mulya	1.066	1.846	1.728	3.574
4.	Marga Mulya	412	696	635	1.331
5.	Arga Mulya	633	1.097	953	2.050
6.	Amin Jaya	1.972	3.129	2.672	5.801
7.	Sidomulyo	551	920	844	1.764
8.	Kebun Agung	383	721	699	1.420
9.	Natai Kerbau	530	454	476	930
10.	Simpang Berambai	546	899	832	1.731
11.	Sungai Hijau	408	961	854	1.815
12.	Sungai Kuning	556	664	558	1.222

13.	Sungai Bengkuang	767	1.656	1.420	3.076
14.	Sungai Pakit	787	1.510	1.382	2.892
15.	Berambai Makmur	139	404	359	763
16.	Sungai Pulau	159	292	248	540
17.	Karang Sari	184	307	333	640
	Jumlah	9.775	16.912	15.152	32.064

Sumber: Laporan Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Bulan Februari 2014

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat terbagi secara alamiah sesuai dengan letak geografis.

1. Desa Karang Mulya dan Desa Amin Jaya, secara umum kegiatan ekonomi masyarakat bergerak disektor perdagangan dan jasa.
2. Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng dan desa-desa sekitarnya, kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berfokus pada kegiatan perkebunan dan sebagian pertanian tanaman pangan.
3. Desa – desa PIR dengan pusat pengembangan di Desa Sidomulyo, arah pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pada sektor perkebunan dengan komoditas utama karet dan ditunjang dengan pengembangan komoditas lain seperti kelapa sawit, hortikultura dan pertanian tanaman pangan.

Faktor lain yang menunjang perekonomian masyarakat adalah adanya perusahaan-perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, diantaranya:

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit:
 - a. PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona (GSPP)
 - b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI)
 - c. PT. Indoturba Tengah
 - d. PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL)
 - e. PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
2. Perusahaan Perkebunan Karet
 - a. PT. Perkebunan Nusantara XIII

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada perencanaan ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan rutin SKPD dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan

fungsi Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik itu melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan serta sosial kemasyarakatan dalam rangka memberikan kesejahteraan serta pembangunan kehidupan bermasyarakat seutuhnya dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kendala utama dalam penentuan angka keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang obyektif adalah karena belum adanya standar pelayanan minimal serta standar operasional prosedur. Selain itu juga disebabkan oleh:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
2. Kemampuan dan keterampilan yang tidak merata pada setiap personil pegawai kecamatan.
3. Belum optimalnya tingkat kedisiplinan pegawai.
4. Anggaran yang disediakan belum mencukupi kebutuhan secara penuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat pimpinan dan staf secara sinergis.
4. Penyesuaian kebijakan dan rencana program prioritas dengan kemampuan anggaran tersedia.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berhubung rancangan awal RKPD belum tersedia maka tidak dapat dipersandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Sebenarnya persandingan tersebut penting untuk melihat apakah hasil analisis kebutuhan masih relevan dan sesuai dengan RKPD dengan adanya berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal SKPD. Dari persandingan itu akan ditemukan apakah perbedaan hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD atau tidak, harus dilakukan intervensi program baru atau tidak dan seterusnya.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Geografis dan Lingkungan

- ❖ Mewujudkan Tata Ruang Kecamatan Pangkalan Banteng sebagaimana Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK) Pangkalan Banteng serta secara bertahap penetapan tata batas antar desa dengan prioritas desa-desa dalam wilayah kecamatan, tata batas dengan desa-desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten dan dengan desa-desa di luar Kabupaten Kotawaringin Barat.
- ❖ Mendukung terciptanya lingkungan yang lestari melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri perkebunan.

2. Perekonomian Masyarakat

- ❖ Menjaga dan memacu kegiatan ekonomi masyarakat (perdagangan dan jasa) agar tetap stabil dan bahkan meningkat.
- ❖ Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui usulan kepada pemerintah daerah/lintas sektor terkait.
- ❖ Memberdayakan organisasi ekonomi masyarakat (Koperasi, UKD, APD, UPK-UPMB dan lain-lain) untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Agama

- ❖ Mengusulkan dan memfasilitasi pembangunan fisik pendidikan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
- ❖ Mengupayakan adanya fasilitas olah raga secara terpusat di ibukota kecamatan.
- ❖ Mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata terutama keluarga miskin melalui program pemerintah yang ada.
- ❖ Mendukung terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal, baik itu yang asli setempat maupun budaya yang dibawa oleh warga masyarakat eks. Transmigrasi.
- ❖ Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama, memfasilitasi rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku serta membina dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.

4. Bidang Pertanahan

- ❖ Mendata dan menginventarisir tanah-tanah milik warga eks. Transmigrasi berupa lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan pangan.
- ❖ Penertiban kepemilikan/penguasaan atas tanah serta surat menyurat (administrasi pertanahan) yang dimiliki oleh masyarakat serta memfasilitasi penyertifikatan tanah masyarakat.

- ❖ Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dengan mengutamakan upaya musyawarah.
- ❖ Bersama masyarakat memfasilitasi dan memberi masukan kritis terhadap rencana penggunaan tanah untuk investasi (perkebunan, pertambangan, dan lain-lain).

5. Sektor Pertanian

- ❖ Peningkatan kelembagaan dan kemampuan petani di tingkat desa.
- ❖ Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan khususnya padi dan kedelai.
- ❖ Peningkatan kemampuan terhadap upaya pencegahan organisme pengganggu (hama) tanaman dengan melibatkan upaya kerjasama petani untuk memperkecil penggunaan racun kimiawi.
- ❖ Program Pembukaan / pencetakan sawah baru dilokasi sentra penanaman padi di Desa Natai Kerbau, Pangkalan Banteng, Marga Mulya dan Mulya Jadi.
- ❖ Mengefektifkan/optimalisasi cekdam Berambai Makmur untuk pengairan yang dibarengi dengan pembukaan areal sawah sampai batas optimal.
- ❖ Peningkatan pendapatan (hasil panen) yang terus meningkat dalam setiap musim tanah.
- ❖ Pembukaan sawah baru dengan lokasi yang potensial di Desa Berambai Makmur, Desa Marga Mulya dan Desa Pangkalan Banteng dengan dukungan instansi terkait.
- ❖ Menindaklanjuti program pengembangan lahan jagung kualitas ekspor baik kualitas maupun kuantitas/perluasan areal lahan jagung.

6. Sektor Peternakan

- ❖ Meningkatkan produksi peternakan baik yang berupa bantuan pemerintah (dengan sistem pengguliran) dan ternak yang dikelola masyarakat secara mandiri, berupa sapi, kambing, ayam/unggas dan sejenisnya.
- ❖ Pengembangan sektor peternakan hewan ternak besar (sapi/kambing) sebagai upaya untuk menggalakkan budi daya peternakan di masyarakat.
- ❖ Mendukung pelaksanaan tugas pos check point hewan ternak yang ada di Desa Amin Jaya sebagai titik pantau masuknya hewan ternak dan unggas dari luar daerah ke Pangkalan Bun.

7. Sektor Perikanan

- ❖ Program pengembangan perikanan darat di beberapa desa potensial yaitu Desa Pangkalan Banteng dengan menggunakan sistem keramba dan kolam ikan di Desa Natai Kerbau, Mulya Jadi, Sidomulyo dan Amin Jaya.
- ❖ Pengembangan tambak untuk masyarakat dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada disekitar desa.
- ❖ Pengembangan budi daya kolam ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Sektor Perkebunan

- ❖ Pengembangan Pertanian dalam arti luas dengan sasaran perkebunan rakyat dengan memberdayakan lahan-lahan eks. Transmigrasi (LU. 1 dan LU. 2) dan lahan kosong yang dikelola oleh masyarakat / desa.
- ❖ Peningkatan dan pengembangan luasan perkebunan masyarakat, bekerja sama dengan perusahaan perkebunan terdekat untuk pengembangan komoditas sawit dan karet yang sudah berjalan sebelumnya (Sistem IGA / kemitraan).
- ❖ Pengembangan kebun desa dalam rangka pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) untuk semua desa dalam wilayah Kecamatan pangkalan Banteng.
- ❖ Pengembangan kebun rakyat dengan komoditas yang sudah dikenal seperti karet dan kelapa sawit.
- ❖ Memfasilitasi kerja sama antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan swasta untuk pembukaan kebun masyarakat, bimbingan teknik dan pemasaran hasil.
- ❖ Mendukung dan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap rencana replanting perkebunan karet plasma dengan PTPN 13 yang sampai pada saat ini usia tanaman sudah memasuki penurunan produktifitas (sudah tua).
- ❖ Memfasilitasi pengembangan bibit terutama kelapa sawit dan karet untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bibit yang berkualitas.

9. Bidang Pemerintahan Umum

- ❖ Menjamin terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.
- ❖ Optimalisasi personal ability melalui pembinaan, bimbingan dan supervisi.

- ❖ Mengupayakan dan mengusulkan ke Pemerintah Daerah (dinas terkait) kelengkapan minimal baik itu personil maupun sarana/prasarana pendukung operasional kegiatan untuk staf dan fisik kantor kecamatan.
- ❖ Peningkatan pengawasan dengan sistem yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan.
- ❖ Menyusun perencanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan melibatkan dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
- ❖ Pembinaan pemerintahan dan lembaga desa melalui supervisi, penyuluhan, sosialisasi dan seminasi program, kegiatan dan aturan yang terkait dengan pemerintahan desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengacu pada fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai unit pelaksana daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

Dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan hal ini tertuang dalam Visi Kecamatan Pangkalan Banteng.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Pangkalan Banteng telah ditetapkan dengan rumusan yakni :

"Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima, Profesional, Produktif dan Responsif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kecamatan Pangkalan Banteng dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan dan jaya".

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai suatu lembaga pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan demi terwujudnya pemberdayaan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Pangkalan Banteng, maka ditetapkanlah misi Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana kantor dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan dengan adanya kemitraan antara masyarakat dengan pihak swasta.
4. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait ditingkat kecamatan dan Daerah.

A. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) tahun. Kecamatan Pangkalan Banteng menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur kecamatan;
- b. Meningkatkan kelancaran kerja dalam pelayanan masyarakat;
- c. Menciptakan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan yang produktif untuk mendukung percepatan pembangunan;

- d. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Terwujudnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang produktif;
- d. Terselenggaranya urusan pemerintahan yang baik;

B. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Adapun Komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional;*

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Pakaian Dinas Harian	31 stel
Jumlah Kegiatan bimtek pegawai	6 kali

Sasaran 2 : *Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;*

Indikator Kinerja	Target
Jumlah pengiriman surat	500 surat
Jumlah jasa telepon, listrik, koran, speedy	2 rek tlp
	4 rek listrik
	2 surat kabar
	1 rek speedy
Jumlah kendaraan dinas/operasional	11 kendaraan
Jumlah jasa administrasi keuangan	18 orang
	750 Lbr materai
	2 Buku cek
Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang

Jumlah peralatan kerja yang terawat	2 buah mesin tik
	6 Buah Komp PC
	3 buah Laptop
	3 buah printer
	1 buah faximili
Jumlah alat tulis kantor	46 macam
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	5 macam
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	4 macam
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 buah Komp PC
	4 buah printer
Jumlah Makanan dan minuman rapat	6 Kali rapat
Jumlah Perjalanan dinas ke desa se-Kecamatan Pangkalan Banteng dan ke Kabupaten Kotawaringin Barat	400 kali
Jumlah pembangunan rumah dinas	1 paket
Jumlah pembangunan gedung kantor	1 paket
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 paket
Jumlah Kendaraan dinas/operasional	1 Unit mobil
	Unit Motor
Jumlah perlengkapan kantor	1 buah mesin potong rumput
Jumlah mebeleur	10 bh kursi kerja
	10 buah meja kerja
Jumlah rumah jabatan yang terawat	1 rumah jabatan
Jumlah rumah dinas yang terawat	6 Rumah dinas
Jumlah Gedung Kantor, Aula, Musholla, gedung PKK dan Pagar yang terawat	2 gedung kantor
	1 gedung aula
	1 Musolla
	1 Gedung PKK
	1 unit pagar
Jumlah kendaraan dinas yang terawat	11 kendaraan
Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat	3 Buah AC
	2 Bh msn p. rumput
	1 Buah genset

Sasaran 3 : *Terwujudnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang produktif;*

Indikator Kinerja	Target
Jumlah APB Desa	17 Desa

Sasaran 4 : *Terselenggaranya urusan pemerintahan yang baik;*

Indikator Kinerja	Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 macam
Jumlah laporan keuangan semesteran	1 macam
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 macam

3.3 Program dan Kegiatan

Secara umum misi dinyatakan dalam kegiatan tahunan yang berkesinambungan, sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Banteng dengan penjabaran pelaksanaan kegiatan berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan jasa alat tulis kantor
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - k. Penyediaan makanan dan minuman
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

- f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan lapuran keuangan semesteran
 - c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2015 dibuat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pangkalan Banteng serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja tahunan sehingga rencana kinerja ini menunjukkan langkah-langkah atau rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan Banteng selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait dengan hal tersebut maka perlu adanya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan dokumen perencanaan ini.

Renja ini merupakan dasar atau bahan evaluasi kinerja tahunan sebagai acuan perencanaan selanjutnya serta laporan atas pelaksanaan renstra SKPD. Sehingga perlu adanya peran aktif dan konsistensi dari para *stakeholders* dalam menjalankan program-program kegiatan yang telah direncanakan bersama demi terlaksananya semua capaian dan tujuan bersama yaitu terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah secara utuh dan menyeluruh.

Karang Mulya , 13 Juni 2014

CAMAT PANGKALAN BANTENG

Drs. ALIRANSYAH

Pembina Tk. I

NIP. 19590819 198303 1 018